

E. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN



**RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PAYAKUMBUH**



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan rahmat Allah S.W.T, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah merupakan perwujudan perencanaan tahunan. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi yang ada di Perangkat Daerah sehingga memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya *Clean Government dan Good Governance*.

Namun disadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya menyusun Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2026. Semoga Rencana Kerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Kegiatan (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2026.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2026.

Payakumbuh, 02 September 2025

**Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran**


DEWI NOVITA, S.STP, M.Si
NIP. 19791214 200003 2 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I PENDAHULUAN		1
1.1 Latar Belakang		1
1.2 Landasan Hukum		2
1.3 Maksud dan Tujuan		4
1.4 Sistematika Penulisan		5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah		7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah		20
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah		27
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD		28
2.5 Penelaahan Usulan Program Masyarakat Dan Kegiatan Masyarakat		36
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH		37
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional		37
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah		38
3.3 Program dan Kegiatan		38
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH		45
BAB V PENUTUP		68
Lampiran		



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan daerah selama satu tahun yang berisi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Perkembangan pembangunan di Kota Payakumbuh, akan berdampak pada berbagai aspek dan norma yang berlaku di masyarakat seperti terjadinya perubahan struktur ekonomi, social budaya dan faktor lainnya yang pada akhirnya akan mempengaruhi pola kehidupan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Perubahan dan dinamika lingkungan, baik lingkungan eksternal (provinsi, nasional, dan bahkan regional dan internasional) maupun lingkungan internal Kota Payakumbuh, yang harus direspon dan diakomodir dalam berbagai penyesuaian perencanaan pembangunan di lingkungan Kota Payakumbuh.

Ketentraman dan ketertiban umum merupakan kebutuhan dasar warga kota dan syarat mutlak untuk melaksanakan pembangunan diberbagai bidang. Tanpa keamanan dan ketertiban yang optimal, maka pelaksanaan pembangunan tidak akan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu ketentraman dan ketertiban umum perlu ditegakkan secara terus menerus dan terorganisir serta penanganan yang sungguh-sungguh dari unsur-unsur terkait.

Fenomena yang terjadi saat ini karena adanya pengaruh globalisasi, reformasi serta krisis ekonomi yang silih berganti mempunyai dampak yang buruk terhadap kehidupan masyarakat. Misalnya, meningkatnya pengangguran, meningkatnya angka kemiskinan, tingginya biaya hidup, timbulnya sentimen kelompok, ego kedaerahan, pengaruh idiologi dan dampak negatif lainnya.

Kemudian dalam bidang sosial, banyak ditemui di perkotaan seperti munculnya usaha kaki lima secara ilegal, tumbuhnya pangkalan ojek dengan menggunakan trotoar dan badan jalan, pemasangan reklame tanpa izin, pemasangan atribut-atribut yang tidak teratur, pelanggaran IMB, tempat usaha yang tidak mempunyai HO/ izin usaha, kenakalan pelajar, peredaran obat-obat terlarang dan minuman keras, perjudian, tumbuh dan berkembangnya anak jalanan (Anak *Punk*), PSK, Waria, dan sebagainya. Keadaan di atas akan memicu kerawanan konflik di bidang sosial dan tidak tertutup kemungkinan terjadi perbuatan anarkis, hal ini jelas mengganggu ketentraman dan ketertiban warga kota.

Kondisi di atas, tentu tidak bisa di tolerir karena akan menimbulkan dampak yang lebih luas lagi. Oleh karena itu perlu sebuah solusi yang tepat dan jitu untuk mengatasi, meminimalisir dan mengantisipasi persoalan tersebut. Diantara solusinya adalah perlu didukung oleh peningkatan kualitas dan kuantitas mulai dari personil, sarana dan dukungan dana yang memadai.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Perangkat Daerah yang menjadi *leading sector* untuk mengkoordinasikan dan menegakkan Penyelenggaraan Tibum dan Tranmas serta penanggulangan bencana kebakaran di



Kota Payakumbuh, dimana saat ini masih adanya kekurangan baik personil, sarana maupun pendanaan. Oleh karenanya perlu dirumuskan dukungan dana yang logis dan memadai sesuai dengan kebutuhan dilapangan dalam sebuah Rencana Kerja Perangkat Daerah Satpol PP tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh disusun dengan berlandaskan kepada :

- a. Landasan Konstitusional yaitu Undang-undang Dasar 1945
- b. Landasan Idiil yaitu Pancasila
- c. Landasan operasional berpedoman kepada :
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6977);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 7. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistim Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemda;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 06);
18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010–2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun



2010-2030 (lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);

20. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 15);
21. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);
22. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2025-2045;
23. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 69);
24. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2025 Tentang RPJMD Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 71);
25. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender;
26. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026;
27. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh tahun 2026 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2026.

Tujuan disusunnya Renja 2026 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut :

1. Acuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Payakumbuh tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh selama tahun 2026.
3. Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian target Penetapan Kinerja;
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;



5. Sebagai acuan untuk membuat laporan fisik dan keuangan serta Evaluasi Rencana Kerja dan;
6. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan Pembangunan Daerah khususnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana kegiatan Satpol PP dan Damkar tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN,

pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Dampaknya terhadap capaian visi



dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/, Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, alasan proses dilaksanakan, penjelasan temuan setelah proses.

2.5. Penelaahan Usulan Program & Kegiatan Masyarakat, berisi uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan pemangku kepentingan

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai :faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.



BAB 2

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan dan juga untuk bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan. Oleh karena itu dalam perencanaan yang transparan dan akuntabel, target capaian indikator kinerja harus ditetapkan secara jelas dan terukur pada setiap komponen indikator.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis yang akan dilaksanakan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Satpol PP dan Damkar Kota Payakumbuh selama tahun 2026.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran pada tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Tabel 2.1)



Tabel 2.1
Target dan Realisasi Program Kegiatan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output		Realisasi Anggaran		%
	Target	Realisasi	Pagu Anggaran	Realisasi	
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			12.377.802.548	11.684.713.247	94,40%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6.319.918.282	5.772.820.737	91,34%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			71.088.800	70.939.740	99,79%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	36.937.750	36.907.775	99,92%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	10 Laporan	34.151.050	34.031.965	99,65%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.046.203.040	4.512.212.460	89,42%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang	41 Orang	4.855.139.840	4.321.818.370	89,02%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	191.063.200	190.394.090	99,65%
Administrasi Umum Perangkat Daerah			277.968.650	277.657.486	99,89%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	1.961.400	1.951.950	99,52%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9 Paket	9 Paket	29.543.500	29.360.340	99,38%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	2 Paket	2.081.500	2.066.520	99,28%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 Laporan	50 Laporan	4.294.250	4.229.250	98,49%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	60 Laporan	240.088.000	240.049.426	99,98%



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output		Realisasi Anggaran		%
	Target	Realisasi	Pagu Anggaran	Realisasi	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			128.710.000	128.180.000	99,59%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	1 Unit	34.570.000	34.040.000	98,47%
Pengadaan Mebel	8 Unit	8 Unit	29.670.000	29.670.000	100,00%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Unit	12 Unit	64.470.000	64.470.000	100,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			62.487.792	57.429.627	91,91%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	3.450.000	3.450.000	100,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Laporan	3 Laporan	18.757.400	13.974.352	74,50%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 Laporan	2 Laporan	40.280.392	40.005.275	99,32%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			733.460.000	726.401.424	99,04%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit	39.190.000	39.190.000	100,00%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21 Unit	21 Unit	687.090.000	680.046.424	98,97%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit	10 Unit	7.180.000	7.165.000	99,79%
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			4.577.915.634	4.476.536.528	97,79%
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			3.852.192.184	3.785.958.103	98,28%
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	846 Orang	846 Orang	401.966.700	378.067.700	94,05%



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output		Realisasi Anggaran		%
	Target	Realisasi	Pagu Anggaran	Realisasi	
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen	2 Dokumen	31.806.600	31.780.955	99,92%
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	50 Laporan	50 Laporan	3.418.418.884	3.376.109.448	98,76%
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			725.723.450	690.578.425	95,16%
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	3 Laporan	3 Laporan	21.246.850	21.069.750	99,17%
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	2 Laporan	2 Laporan	704.476.600	669.508.675	95,04%
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			1.479.968.632	1.435.355.982	96,99%
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.275.842.032	1.241.904.997	97,34%
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	21.246.750	20.376.700	95,91%
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	168 Laporan	168 Laporan	1.204.645.282	1.172.288.697	97,31%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	20 Unit	20 Unit	49.950.000	49.239.600	98,58%
Investigasi Kejadian Kebakaran			17.059.900	16.051.000	94,09%
Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen	17.059.900	16.051.000	94,09%
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			137.107.800	128.270.085	93,55%
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	94 Orang	94 Orang	137.107.800	128.270.085	93,55%
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia			49.958.900	49.129.900	98,34%
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	20 Laporan	20 Laporan	49.958.900	49.129.900	98,34%



Pelaksanaan program dan kegiatan diatas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut :

- a. Penyiapan tenaga Banpol PP dan pemadam kebakaran Non ASN dalam menjaga ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.
- b. Penjagaan tempat penting yang merupakan aset tidak bergerak milik Pemerintah Kota Payakumbuh dilaksanakan di 13 tempat.
- c. Pelaksanaan patroli yang dilaksanakan guna pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dilakukan sebanyak 720 kali dalam 1 tahun di Kota Payakumbuh
- d. Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan juga dilakukan dengan sekolah yang ada di Kota Payakumbuh.
- e. Sosialisasi mengenai Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang berlaku di Kota Payakumbuh sudah dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun.
- f. Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran selama tahun 2024 adalah sebanyak 405 kejadian.
- g. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebanyak 94 orang melalui pelaksanaan pelatihan bagi Relawan Pemadam Kebakaran yang tersebar di setiap kelurahan di Kota Payakumbuh.
- h. Penyisiran tabung APAR ke lokasi usaha masyarakat dilakukan petugas guna pencegahan kebakaran.
- i. Pengadaan sarana dan prasarana dalam menjaga ketentraman masyarakat, ketertiban umum, dan pemadaman kebakaran serta kegiatan penyelamatan.

Berdasarkan tabel 2.1 diatas, secara umum capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian kinerja yang masih diharapkan dapat dilakukan di OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah :

- Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan

Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia. Pada sub kegiatan ini melibatkan Satlinmas yang tersebar di Kelurahan se Kota Payakumbuh yang diharapkan dapat meningkatkan keamanan di Kota Payakumbuh sehingga visi ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan Kota Payakumbuh yang tertuang dalam rancangan RPJPD 2025-2045 dapat tercapai.



Untuk lebih rinci, evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah dan pencapaian renstra perangkat daerah s/d tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.2

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024
KOTA PAYAKUMBUH**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sd tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd Tahun Berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	90	90	90	91,43	101,59%	90,00	271,43	301,59%
						Hasil Penilaian AKIP Perangkat daerah dari Satpol PP	A	A	A	A	100%	A	A	100%
1	05	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan jumlah evaluasi kinerja yang tersedia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	4 Dokumen	14 Dokumen	280,00%
1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Laporan	10 Laporan	100%	6 Laporan	26 Laporan	260,00%
1	05	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja program/kegiatan dan persentase dokumen kepegawaian yang lengkap	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	48 Orang / Bulan	45 Orang / Bulan	45 Orang / Bulan	43 Orang / Bulan	95,56%	46 Orang / Bulan	134 Orang / Bulan	279,17%
1	05	01	2.02	0002	Penyediaan administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	-	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	36 Dokumen	#DIV/0!
1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	-	-	-	-	-	14 Laporan	14 Laporan	#DIV/0!



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sd tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd Tahun Berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	05	01	2.05		Kegiatan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN Berpakaian Dinas dengan atribut lengkap	100%	100%	-	-	-	100%	100%	100%
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	165 Paket	165 Paket	-	-	-	209 Pket	209 Paket	126,67%
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 Paket	5 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	7 Paket	140,00%
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peraltan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	-	-	-	-	-	0,00%
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-	-	-	-	2 Paket	2 Paket	#DIV/0!
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	50 Paket	50 Paket	9 Paket	9 Paket	100%	5 Paket	64 Paket	128,00%
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1698 Paket	1698 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	1702 Paket	100,24%
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2 Paket	-	-	-	-	-	-	0,00%
1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan tamu	50 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	100%	2 Laporan	102 Laporan	204,00%
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	60 Laporan	60 Laporan	60 Laporan	100%	12 Laporan	132 Laporan	220,00%



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sd tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd Tahun Berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	05	01	2.07		Kegiatan Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan barang milik daerah Satpol PP dan Damkar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	1 Unit	1 Unit	100%	4 Unit	5 Unit	#DIV/0!
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	8 Unit	8 Unit	100%	25 Unit	33 Unit	#DIV/0!
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	5 unit	12 Unit	12 Unit	100%	15 Unit	27 Unit	900,00%
1	05	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	300,00%
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	2 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	12 Laporan	17 Laporan	850,00%
1	05	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	3 Laporan	3 Laporan	-	-	-	-	3 Laporan	0,00%
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	12 Laporan	16 Laporan	800,00%



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sd tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd Tahun Berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	05	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kendaraan Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	13 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	15 Unit	115,38%
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit	19 Unit	19 Unit	100%	25 Unit	53 Unit	588,89%
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	10 Unit	10 Unit	100%	12 Unit	22 Unit	#DIV/0!
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
						Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelanggaran perda yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bemuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	758 Orang	758 Orang	846 Orang	846 Orang	100%	57 Orang	1661 Orang	219,13%



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sd tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd Tahun Berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	05	02	2.01	0006	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	300,00%
1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah kasus gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawasan	50 Kasus	50 Kasus	50 Laporan	50 Laporan	100%	50 Laporan	150 Laporan	300,00%
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase masyarakat yang memahami Perda Pekat	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/ Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	9 Laporan	300,00%
1	05	02	2.02	0011	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan Pelaksanaan Penangan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang dapat ditangani sesuai SOP	12 Laporan	12 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	12 Laporan	26 Laporan	216,67%
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase kasus kebakaran WMK yang tertangani dalam waktu tanggap	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
						Waktu Tanggap (Response time) Penangana Kebakaran	15 Menit	15 Menit	15 Menit	7,51 Menit	100%	15 Menit	7,59 Menit	100%



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sd tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd Tahun Berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus kebakaran WMK yang tertangani dalam waktu tanggap	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam daerah Kabupaten/ Kota setiap tahunnya	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	9 Dokumen	300,00%
1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah kabupaten/ Kota	168 Laporan	168 Laporan	168 Laporan	168 Laporan	100%	12 Laporan	348 Laporan	207,14%
1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	-	-	20 Unit	20 Unit	100%	53 Unit	73 Unit	#DIV/0!
1	05	04	2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase Relawan yang bersertifikat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	05	04	2.03	0001	Investigasi Kejadian Kebakaran meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	300%
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Relawan yang bersertifikat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui sosialisasi dan edukasi	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi dan edukasi pencegahan dan penanggulangan Kebakaran setiap tahunnya	94 Orang	94 Orang	94 Orang	94 Orang	100%	94 Orang	282 Orang	300%



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sd tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd Tahun Berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	05	04	2.05	0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Jumlah laporan hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang mengancam Keselamatan Manusia		20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	100%	5 Laporan	45 Laporan	#DIV/0!



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

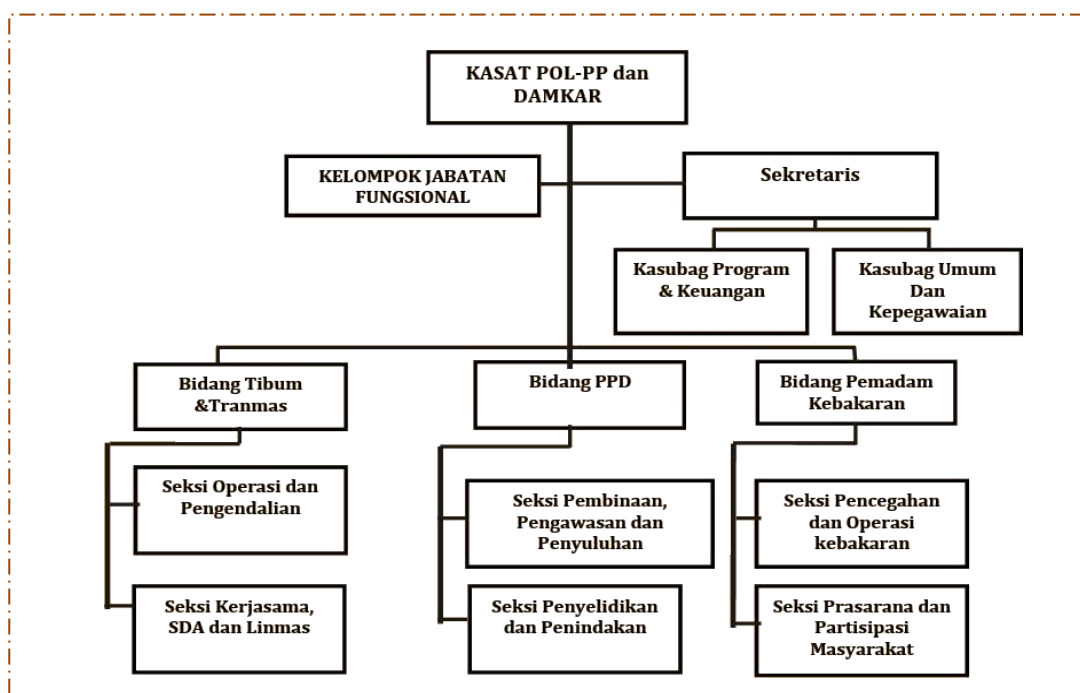
Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran yang menyelenggarakan sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.

Dalam melaksanakan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub pol-pp dan sub kebakaran)
- Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub pol-pp dan sub kebakaran)
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub pol-pp dan sub kebakaran)
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sampai saat ini, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh.

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI





Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kepala satuan mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah, serta penanggulangan bencana kebakaran.

Kepala satuan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub pol-pp dan sub kebakaran)
- b. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub pol-pp dan sub kebakaran)
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub pol-pp dan sub kebakaran)
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris

Mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaa operasional urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- d. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Satuan;
- e. Pengelolaan informasi publik terkait kebijakan Satuan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.



Sub bagian ini menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, rumah tangga, sarana prasarana, aset;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja;
- c. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan kepegawaian;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Program dan Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan keuangan lingkup Satuan.

Sub bagian ini menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian, penyusunan dan penyiapan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaanm pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan lingkup Satuan;
- b. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan perencanaan program dan kegiatan, penatausahaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan lingkup Satuan;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan lingkup Satuan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Bidang ini menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- b. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- d. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;



- e. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Seksi Operasi dan Pengendalian

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Operasi dan Pengendalian.

Seksi ini menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program kegiatan Seksi Operasi dan Pengendalian;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Operasi dan Pengendalian;
- c. Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Operasi dan Pengendalian;
- d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan Seksi Operasi dan Pengendalian;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kerjasama, SDA, dan Linmas

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Kerjasama, SDA, dan Linmas.

Seksi ini menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program kegiatan Seksi Kerjasama, SDA, dan Linmas;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Kerjasama, SDA, dan Linmas;
- c. Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Kerjasama, SDA, dan Linmas;
- d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan Seksi Kerjasama, SDA, dan Linmas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penegakan Peraturan Daerah

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang Penegakan Peraturan Daerah.

Bidang ini menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
- b. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
- d. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.



Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan, pengawasan dan penyuluhan.

Seksi ini menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program kegiatan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- b. Pelaksanaan program kegiatan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- c. Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan.

Seksi ini menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program kegiatan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
- b. Pelaksanaan program kegiatan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
- c. Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
- d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemadam Kebakaran

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Pemadam Kebakaran.

Bidang ini menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Pemadam Kebakaran;
- b. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Pemadam Kebakaran;
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pemadam Kebakaran;



- d. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pemadam Kebakaran;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Seksi Pencegahan dan Operasi Kebakaran

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Pencegahan dan Operasi Kebakaran.

Seksi ini menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program kegiatan Seksi Pencegahan dan Operasi Kebakaran;
- b. Pelaksanaan program kegiatan Seksi Pencegahan dan Operasi Kebakaran;
- c. Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan dan Operasi Kebakaran;
- d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan Pencegahan dan Operasi Kebakaran;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Sarana Prasarana dan Partisipasi Masyarakat

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sarana dan partisipasi masyarakat.

Seksi ini menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program kegiatan Seksi Sarana Prasarana dan Partisipasi Masyarakat;
- b. Pelaksanaan program kegiatan Seksi Sarana Prasarana dan Partisipasi Masyarakat;
- c. Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Sarana Prasarana dan Partisipasi Masyarakat;
- d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan Seksi Sarana Prasarana dan Partisipasi Masyarakat;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan penetapan kinerja, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai beberapa indikator kinerja pelayanan, sebagaimana terlihat pada tabel 2.3 sebagai berikut:



Tabel 2.3
Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Ketertiban Umum			25	5	5	5	28,49	-	5	5	
2	Persentase Penyelesaian Gangguan Trantibum		√	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Nilai Evaluasi SAKIP Satpol PP dan Damkar			A	A	A	A	A	A	A	A	



2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Satpol PP Damkar Kota Payakumbuh sudah menyusun program kerja yang tersusun dalam Rencana Strategis 2025-2029. Dalam RPJMD tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mendukung misi “Menghadirkan Tata Kelola Pemerintah yang Profesional dan Kondusif”.

Selama menjalankan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi. Permasalahan yang ditemui sebagai berikut :

A. Satuan Polisi Pamong Praja

1. Masih adanya potensi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
2. Masih kurangnya pemberdayaan Satlinmas tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
3. Masih kurangnya keterlibatan tokoh agama, tokoh adat, dan lembaga terkait dalam menjaga ketentraman umum, ketertiban, dan perlindungan masyarakat.
4. Belum optimalnya sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi trantibumlinmas.
5. Penambahan dan peningkatan kapasitas SDM dalam menegakkan Perda dan Perkada Kota Payakumbuh.

B. Pemadam Kebakaran

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan kebakaran.
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memprioritaskan kendaraan pemadam kebakaran saat melaksanakan operasi.
3. Masih lemahnya koordinasi antar instansi, terkait penerbitan izin mendirikan bangunan dan izin usaha dengan bidang damkar.
4. Pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan yang masih minim.
5. Penambahan dan peningkatan kapasitas SDM dalam melakukan pemadam kebakaran dan penyelamatan.

Menjaga ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran memegang peranan dalam mewujudkan kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh. Permasalahan yang dihadapi berdampak langsung pada kinerja yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam melakukan kegiatan Penegakan Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran melibatkan aparat keamanan yang tergabung dalam tim 7 seperti Kodim TNI, Koramil, Batalyon, Pom ABRI, Polres, Polsek, dan Kejaksaan.



Patroli untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Kawasan Kota Payakumbuh juga dilakukan setiap hari oleh petugas dengan cara yang telah ditetapkan sesuai dengan SOP yang berlaku. Untuk meningkatkan kewaspadaan serta meminimalisir dampak kerugian saat terjadinya kebakaran, petugas pemadam kebakaran melakukan piket siaga 24 jam, sehingga dapat memberi rasa aman bagi masyarakat.

Armada pemadam kebakaran saat ini juga dirasa kurang mendukung. Mengingat Kota Payakumbuh termasuk kawasan padat penduduk dimana akses jalan banyak diantaranya tidak dapat ditempuh oleh armada yang tersedia saat ini. Sehingga jika terjadi kebakaran pada kawasan padat penduduk, petugas pemadam kebakaran kesulitan untuk mencapai titik lokasi kebakaran.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh tentu memiliki tantangan sendiri. Adapun beberapa tantangan yang dihadapi yaitu :

1. Pesatnya pembangunan Kota Payakumbuh meningkatkan potensi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
2. Ketersediaan personil belum memenuhi tuntutan dari masyarakat.
3. Sarana dan prasarana yang tersedia belum maksimal.
4. Mengubah paradigma penanggulangan kebakaran dari sikap responsive menjadi sikap preventif.

Di samping tantangan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, terdapat beberapa peluang yang bisa dimanfaatkan, diantaranya :

1. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap lingkungan yang aman dan tertib menjadikan seluruh lapisan masyarakat sadar akan pentingnya menjaga trantibumlinmas.
2. Membangun kerjasama dengan Kepolisian, TNI, dan aparat penegak hukum lainnya.
3. Adanya kesempatan untuk pelatihan dan pendidikan bagi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
4. Ketersediaan anggaran.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2026, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan rancangan awal RKPD tahun 2026 dan hasil analisis kebutuhan dengan memperhatikan prioritas program/ kegiatan dan kemampuan anggaran pada Pemerintah Kota Payakumbuh yang selanjutnya tertuang dalam RKPD 2026. Pembandingan antara rancangan awal RKPD tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dimaksudkan untuk penyesuaian anggaran pada



program/kegiatan dengan memperhatikan prioritas program/ kegiatan dalam mendukung pencapaian tujuan RKPD tahun 2026.



Tabel 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026
KOTA PAYAKUMBUH

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai IKM	87	6.520.599.992	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai IKM Satpol PP dan Damkar	87	7.272.740.462	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan dan jumlah evaluasi kinerja yang tersedia	100%	77.862.600	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan dan jumlah evaluasi kinerja yang tersedia	100%	88.185.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	9.545.150	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	10.500.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	65.499.950	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	72.050.000	
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1.408.750	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	2.817.500	
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	100 Data	1.408.750	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	100 Data	2.817.500	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase capaian kinerja program/kegiatan dan persentase dokumen kepegawaian yang lengkap	100%	5.759.313.529	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase capaian kinerja program/kegiatan dan persentase dokumen kepegawaian yang lengkap	100%	5.864.944.652	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 orang/bulan	5.408.599.929	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 orang/bulan	5.513.599.527	



No.	Rancangan Awal RKPd Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	344.400.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	344.400.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	12 Laporan	6.313.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	14 Laporan	6.945.125	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	100%	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	100%	336.680.750	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0 Paket	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	202 Paket	336.680.750	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	100%	117.857.250	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	100%	237.367.500	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.647.650	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.500.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	29.579.500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	38.500.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.081.150	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3.600.000	
	Fasilitasi kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.058.200	Fasilitasi kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	4.950.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	80.082.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	185.000.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	1.408.750	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	2.817.500	



No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-					156.087.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	38.087.000	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	-	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	18 Unit	83.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	35.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	100%	104.546.613	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	100%	120.355.560	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.450.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.500.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	14.996.613	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	16.500.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	86.100.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	99.355.560	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	100%	461.020.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	100%	469.120.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	39.190.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	42.950.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 unit	413.670.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 unit	413.670.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	8.160.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.500.000	



No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum		Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	100%	3.552.927.585	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum		Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	100%	4.748.820.550	
			Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	100%				Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	100%		
			Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	80%				Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	80%		
			Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	100%				Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	100%		
	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pelanggaran perda yang ditindaklanjuti	100%	3.026.850.060	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pelanggaran perda yang ditindaklanjuti	100%	3.685.000.000	
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2 Dokumen	36.003.000	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2 Dokumen	75.000.000	
	Peningkatan kapasitas SDM Satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia		Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	122 Orang	38.312.250	Peningkatan kapasitas SDM Satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia		Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	122 Orang	85.000.000	
	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pencegahan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pencegahan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	12 Laporan	2.952.534.810	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pencegahan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pencegahan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	50 Laporan	3.600.000.000	



No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota		Persentase masyarakat yang memahami perda pekat	80%	526.077.525	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota		Persentase masyarakat yang memahami perda pekat	80%	1.063.820.550	
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2 Laporan	21.246.750	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2 Laporan	38.500.000	
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 Laporan	504.830.775	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 Laporan	1.025.320.550	
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran		Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	3.627.736.875	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran		Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	3.999.958.140	
			Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	60%				Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	60%		
	Pencegahan , Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kasus kebakaran WMK yang tertangani dalam waktu tanggap	100%	3.458.916.075	Pencegahan , Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kasus kebakaran WMK yang tertangani dalam waktu tanggap	100%	3.673.000.000	
	Pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota		Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan n Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen	20.376.750	Pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota		Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan an Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen	23.000.000	
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	1.307.110.225	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	168 Laporan	1.450.000.000	



No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	5 Unit	2.131.429.100	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	5 Unit	2.200.000.000	
	Investigasi Kejadian Kebakaran		Persentase Investigasi kejadian kebakaran yang dilaksanakan	100%	16.059.650	Investigasi Kejadian Kebakaran		Persentase Investigasi kejadian kebakaran yang dilaksanakan	100%	14.850.000	
	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran		Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	1 Dokumen	16.059.650	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran		Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	1 Dokumen	14.850.000	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		Persentase Relawan yang bersertifikat	100%	110.677.850	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		Persentase Relawan yang bersertifikat	100%	137.108.140	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat		Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	94 orang	110.677.850	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat		Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	94 orang	150.500.000	
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		Persentase Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia yang Dilaksanakan	100%	42.083.300	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		Persentase Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia yang Dilaksanakan	100%	175.000.000	
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	12 Laporan	42.083.300	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	12 Laporan	175.000.000	
JUMLAH					13.701.264.452	JUMLAH					16.021.519.152



2.4 Penelaahan Usulan Program Masyarakat Dan Kegiatan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam penyusunan program dan kegiatan terlebih dahulu menampung aspirasi masyarakat yang langsung ditujukan ke Perangkat Daerah. Berdasarkan hasil rumusan pemangku kepentingan tersebut.

Usulan program masyarakat belum ada pada Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2025 sebagaimana yang tertuang dalam kegiatan prioritas hasil musrenbang kecamatan tahun 2025 dengan rancangan renja perangkat daerah tahun 2026 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.5
PERSANDINGAN DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS HASIL MUSRENBANG
KECAMATAN TAHUN 2025 DENGAN RANCANGAN RENJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

NO	Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2025				Kegiatan sesuai Renja Perangkat Daerah Tahun 2026		
	Kegiatan Prioritas	Lokasi (Kelurahan)	Indikator Kinerja	Volume	Kegiatan/ subkeg Rancangan Renja Tahun 2026	Pagu Indikatif Tahun 2025	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8
1	NIHIL						

Tabel 2.6
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
TAHUN 2026
KOTA PAYAKUMBUH

NO	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	NIHIL				



BAB 3

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tugas pokok yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah diatas, Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Tabel 3.1
Persandingan antara Prioritas Nasional, Provinsi, Kota dengan Usulan Rencana Kerja Tahun 2026

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Prioritas Pembangunan Kota Payakumbuh	Program/ Kegiatan dalam Renja 2026
Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Peningkatan kualitas tata kelola Penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran



3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Rumusan tujuan dan sasaran Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh tahun 2026 yang juga tertuang dalam Renstra OPD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2

RUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN TAHUN 2026

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	CAPAIAN 2024	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN PERIODE RPJMD					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	87	87	87	87	87	87	87
		2. Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.	2. Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			3. Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
		3. Meningkatnya Pelayanan Perlindungan Masyarakat dan Pemadaman Kebakaran	4. Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			5. Waktu Tanggap (Respon Time) Penanganan Kebakaran	5,6 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit

3.3 Program dan Kegiatan

Merujuk kepada pengumuman Komisi Pemilihan Umum nomor 27/PL.02.2 Pu/1376/2024 tentang visi, misi dan program pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Payakumbuh tahun 2024 dan mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, maka visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih adalah sebagai berikut:

“Payakumbuh Maju Bermartabat Melalui Pemberdayaan, Pengembangan Kualitas Pendidikan, dan Sentra UMKM yang Kompetitif”

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menjalankan misi ke-3 dari pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Payakumbuh terpilih, yaitu :

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Kondusif”



Selain itu, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran juga menjadi pengampu penerapan standar pelayanan dasar bidang trantibumlinas yang terdiri dari 2 layanan, yaitu :

1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum
2. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi diatas, serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, perlu adanya dukungan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana yang telah tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pada tahun 2025, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 13.701.264.452,- yang terdiri dari 3 program 11 kegiatan dan 30 sub kegiatan yang dapat dilihat dalam table berikut :



Tabel 3.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN TAHUN
2026 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027
KOTA PAYAKUMBUH

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana*)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Kota Payakumbuh		13.701.264.802	DAU			16.594.830.165
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				13.701.264.802	DAU			16.594.830.165
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM Satpol PP dan Damkar		90	6.520.600.342	DAU		90	7.722.980.165
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Jumlah Evaluasi Kinerja yang Tersedia		100%	77.862.950	DAU		100%	87.550.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4 dokumen	9.545.450	DAU		4 dokumen	10.500.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6 Laporan	65.500.000	DAU		6 Laporan	72.050.000
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		1 Dokumen	1.408.750	DAU		1 Dokumen	2.500.000
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		100 Data	1.408.750	DAU		100 Data	2.500.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/Kegiatan dan Persentase Dokumen Kepegawaian yang Lengkap		100%	5.759.313.529	DAU		100%	6.416.304.605
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		54 orang/bulan	5.408.599.929	DAU		54 Orang/Bulan	6.064.959.480
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Dokumen	344.400.000	DAU		12 Dokumen	344.400.000



No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana*)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		12 Laporan	6.313.600	DAU		12 Laporan	6.945.125
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap		100%	-	DAU		100%	249.550.000
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		0 Paket	-	DAU		200 Paket	249.550.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana		100%	117.857.250	DAU		100%	249.550.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	1.647.650	DAU		1 Paket	2.500.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		5 Paket	29.579.500	DAU		5 Paket	38.500.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	2.081.150	DAU		1 Paket	3.600.000
	Fasilitasi kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		1 Laporan	3.058.200	DAU		1 Laporan	4.950.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	80.082.000	DAU		12 Laporan	185.000.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		12 Dokumen	1.408.750			12 Dokumen	15.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan barang milik daerah Satpol PP dan Damkar		100%	6	DAU		100%	126.000.010
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		0 Unit	-	DAU		1 Unit	38.000.000



No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana*)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0 Unit	-	DAU		18 Unit	50.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 Unit	-	DAU		6 Unit	38.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana		100%	104.546.613	DAU		100%	120.355.560
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	3.450.000	DAU		1 Laporan	4.500.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	14.996.613	DAU		12 Laporan	16.500.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	86.100.000	DAU		12 Laporan	99.355.560
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan		100%	461.020.000	DAU		100%	473.670.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 unit	39.190.000	DAU		1 Unit	45.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		19 unit	413.670.000	DAU		12 Unit	413.670.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		10 Unit	8.160.000	DAU		15 Unit	15.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan		100%	3.552.927.591	SILPA		100%	4.948.500.010
		Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas		100%				100%	
		Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat		80%				80%	
		Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya		100%				100%	
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelanggaran perda yang ditindaklanjuti		100%	3.026.850.066	SILPA		100%	3.760.000.010
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan		2 Dokumen	36.003.000	SILPA		2 Dokumen	75.000.000



No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana*)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpra dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		122 Orang	38.312.250	SILPA		846 Orang	85.000.000
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		12 Laporan	2.952.534.810	SILPA		50 Laporan	3.600.000.000
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase masyarakat yg memahami perda pekat		80%	526.077.525	SILPA		80%	1.188.500.000
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		2 Laporan	21.246.750	SILPA		2 Laporan	38.500.000
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP		12 Laporan	504.830.775	SILPA		12 Laporan	1.150.000.000
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran		100%	3.627.736.875	SILPA		100%	3.923.350.000
		Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran		60%				60%	
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus kebakaran WMK yang tertangani dalam waktu tanggap		100%	3.458.916.075	SILPA		100%	3.673.000.000
	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya		1 Dokumen	20.376.750	SILPA		3 Dokumen	23.000.000
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		12 Laporan	1.307.110.225	SILPA		168 Laporan	1.450.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait		5 Unit	2.131.429.100	SILPA		20 Unit	2.200.000.000



No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana*)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase Investigasi kejadian kebakaran yang dilaksanakan		100%	16.059.650	SILPA		100%	14.850.000
	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian		1 Dokumen	16.059.650	SILPA		1 Dokumen	14.850.000
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase relawan yang bersertifikat		100%	110.677.850	SILPA		100%	150.500.000
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya		94 orang	110.677.850	SILPA		94 Orang	150.500.000
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia yang Dilaksanakan		100%	42.083.300	SILPA		100%	85.000.000
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia		12 Laporan	42.083.300	SILPA		20 Laporan	85.000.000



BAB 4

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan rencana program dan kegiatan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Payakumbuh dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Renja, pencapaian Renstra, dan visi dan misi Kota Payakumbuh.

Usulan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan SiLPA untuk 2 program lainnya sesuai dengan pagu indikatif tahun 2026 terdiri dari 3 Program, 11 Kegiatan dan 30 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
 - a. Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**
 - a. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota
 - b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota
- 3. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**
 - a. Pencegahan , Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Investigasi Kejadian Kebakaran
 - c. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
 - d. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia.



Tabel 4.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2026

Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN						13.701.264.452,00							15.999.588.105,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						13.701.264.452,00							15.999.588.105,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						13.701.264.452,00							15.999.588.105,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	-			91 Indeks	6.520.599.992,00						-	7.127.738.105,00	
		[Meningkatkan kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah]	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Nilai Evaluasi AKIP Oleh Inspektorat Nilai IKM	87 90 91 A	87 90 90.43 91 A	87 90 91 A	87 90 91 A	6.520.599.992,00	-	-	-	-	-	-	7.127.738.105,00	-
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	-			100 %	77.862.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Aparatur	-	87.550.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	9.545.150,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Aparatur		10.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	65.499.950,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Aparatur		72.050.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		-	-	-	-	-	-	6.520.599.992,00	-	-	-	-	-	-	7.127.738.105,00	-
1.05.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah															



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1.408.750,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Aparatur		2.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				100 Data	1.408.750,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Aparatur		2.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		[Meningkatnya kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah]	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Nilai Evaluasi AKIP Oleh Inspektorat Nilai IKM	87 90 91 A	87 90 90.43 91 A	87 90 91 A	87 90 91 A	6.520.599.992,00	-	-	-	-	-	-	7.127.738.105,00	-



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu	-			100 %	5.759.313.529,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Aparatur	-	6.294.638.105,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				54 Orang/bulan	5.408.599.929,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Aparatur		6.064.959.480,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	344.400.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Aparatur		222.733.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				12 Laporan	6.313.800,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Aparatur		6.946.126,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks layanan administrasi perangkat daerah	-			75 %	117.857.250,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas.	Aparatur	-	249.550.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.647.650,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas.	Aparatur		2.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	29.579.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Aparatur		38.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.081.150,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Aparatur		3.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	3.058.200,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Aparatur		4.950.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	80.082.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Aparatur		185.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		-	-	-	-	-	-	6.520.599.992,00	-	-	-	-	-	-	7.127.738.105,00	-
	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	1.408.750,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Aparatur		15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		[Meningkatkan kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah]	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Nilai Evaluasi AKIP Oleh Inspektorat Nilai IKM	87 90 91 A	87 90 90.43 91 A	87 90 91 A	87 90 91 A	6.520.599.992,00	-	-	-	-	-	-	7.127.738.105,00	-
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	-			80 %	104.548.613,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Aparatur	-	88.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.450.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Aparatur		4.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	14.998.813,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Aparatur		15.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	86.100.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperku t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberiant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Aparatur		65.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	-			80 %	461.020.000,00			Memperku t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberiant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Aparatur	-	410.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	39.190.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Aparatur		45.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				22 Unit	413.670.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Aparatur		350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	8.160.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Aparatur		15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan, Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat, Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	-			100,100 % 80,100 %	3.552.927.585,00						-	4.948.500.000,00	
		[Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkada, Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat, Meningkatnya kapasitas SDM PPNS]	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	100 80 95	0 100 80	0 100 85	100 80 85	3.552.927.585,00	-	-	-	-	-	-	4.948.500.000,00	-



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelanggaran perda yang ditindaklanjuti	-			100 %	3.026.850.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Masyarakat	-	3.780.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				2 Dokumen	36.003.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Masyarakat		75.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas</i>				122 Orang	38.312.250,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan biokrasi, serta memperkuat penegapan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraaan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Masyarakat		85.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Keteritban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan														
			<i>Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketteritban Umum yang Dioegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan</i>				12 laporan	2.952.534.810,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kei/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan biokrasi, serta memperkuat penegapan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraaan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Masyarakat		3.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase masyarakat yg memahami perda pekat	-			80 %	528.077.525,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan biokrasi, serta memperkuat penegagan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaran pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Masyarakat	-	1.188.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				2 Laporan	21.246.750,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan biokrasi, serta memperkuat penegagan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaran pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Masyarakat		38.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				12 Laporan	504.830.775,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Masyarakat		1.150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
3.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	-			100 % 60 %	3.627.736.875,00						-	3.923.350.000,00	
		[Meningkatkan layanan pencegahan kebakaran, Meningkatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran]	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	100 90	0 100	0 100 50	100 60	3.627.736.875,00	-	-	-	-	-	-	3.923.350.000,00	-
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beraun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus kebakaran Wilk yang tertangani dalam waktu tanggap	-			100 %	3.458.916.075,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Masyarakat	-	3.673.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				1 Dokumen	20.376.750,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Masyarakat		23.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Pelugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				12 Laporan	1.307.110.225,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Masyarakat		1.450.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				5 Unit	2.131.429.100,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Masyarakat		2.200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase Investigasi kejadian kebakaran yang dilaksanakan	-			100 %	18.059.850,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Masyarakat	-	14.850.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Melalui Penelitian dan Pengujian				1 Dokumen	16.059.850,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Masyarakat		14.850.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase relawan yang bersertifikat	-			100 %	110.677.850,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Masyarakat	-	150.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				94 Orang	110.677.850,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Masyarakat		150.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia yang Dilaksanakan	-			100 %	42.083.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Masyarakat	-	85.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia				12 Laporan	42.083.300,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Masyarakat		85.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	J U M L A H							13.701.264.452,00							15.999.588.105,00	



BAB 5 PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Satpol PP dan Damkar Kota Payakumbuh selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Satpol PP dan Damkar. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Satpol PP dan Damkar Kota Payakumbuh. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Satpol PP dan Damkar Kota Payakumbuh, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Rencana ini akan mampu memberikan arah, strategi, target dan sasaran yang tepat, fleksibel dengan perkembangan situasi yang terjadi khususnya dalam penegakkan peraturan daerah Kota Payakumbuh, namun tidak tertutup kemungkinan rencana ini akan mengalami hambatan-hambatan yang tidak diprediksi sebelumnya, untuk itu diharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan perencanaan untuk masa mendatang.

Payakumbuh, 02 September 2025

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh

DEWI NOVITA, S.STP, M.Si
NIP. 19791214 200003 2 001